

## ABSTRAK

Disiplin Pegawai Negeri sipil (PNS) pada kantor pemerintahan bergantung pada adanya arahan dan pengawasan yang didapatkan oleh pegawai. Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki hak untuk memberikan hukuman pada setiap pegawai. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan aspek pengawasan aparatur berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada pegawai di kantor Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur (Kaltim) dan mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penghambat pengawasan aparatur berdasarkan PP tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan data yang diperoleh dari wawancara kepada sebelas informan pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim.

Hasil penelitian tentang penerapan aspek pengawasan aparatur berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim menggunakan proses dan teknik pengawasan dari teori Griffin dan teori Koontz . Pengawasan pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung bekerja sama dengan BKD dan Inspektorat. Factor-faktor yang menghambat pengawasan aparatur berdasarkan PP tersebut terdiri dari kurangnya kualitas pegawai, mentalitas pegawai, dan kurangnya sosialisasi implementasi PP tersebut.

Kata kunci: model pengawasan, disiplin, supervise, Pegawai Negeri Sipil

